

**Resimen Mahasiswa (MENWA) 804 Universitas Negeri Surabaya tahun 1994-2000**

**Emalia Lailatul Fazriah**  
Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [liaema49@gmail.com](mailto:liaema49@gmail.com)

**Agus Trilaksana**  
S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Resimen Mahasiswa atau yang disingkat Menwa merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan keikutsertaan dalam upaya bela negara yang disusun, diorganisasikan, dan dibentuk secara kewilayahan pada provinsi daerah tingkat satu dan sebagai satuan resimen mahasiswa (SATMENWA) diperguruan tinggi. Penelitian ini menarik karena membahas tentang pengalihan pembinaan Menwa dari SKB III Menteri ke Perguruan tinggi. Penelitian ini menjawab rumusan masalah yaitu tentang Mengapa terjadi Pengalihan pembinaan Menwa dari SKB III Menteri ke masing- masing perguruan tinggi dan Bagaimana kebijakan Rektor dalam pembinaan Menwa di Universitas Negeri Surabaya dari rumusan masalah ini kita dapat mengetahui lebih dalam tentang organisasi Menwa 804 Universitas Negeri Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan objek penelitian adalah organisasi Menwa 804 Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu, Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara pencarian sumber fakta-fakta sejarah dalam bentuk tertulis (arsip, jurnal, buku dll) dan sumber lisan (wawancara). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pola pembinaan Menwa dari tahun 1994- 2000 mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan hasil pemahaman, penulis menyimpulkan fakta dan bukti sesuai sejarah pembinaan dan pemberdayaan Menwa dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah akan penggunaan Ratih sebagai komponen dasar keamanan dan pertahanan negara. Pembinaan Menwa tahun 2000 lebih difokuskan pada pembinaan Menwa sebagai UKM khusus yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan negara.

**Kata Kunci:** Resimen Mahasiswa, Nasionalisme, dan Bela Negara

**Abstract**

*Student Regiment or abbreviated as Menwa is a means of developing students themselves towards broadening their horizons and increasing their participation in efforts to defend the country which are compiled, organized, and formed regionally in first-level regional provinces and as student regiment units (SATMENWA) in universities. This research is interesting because it discusses the transfer of Menwa guidance from Ministerial III SKB to Higher Education. This study answers the formulation of the problem, which is about why there is a transfer of Menwa guidance from Ministerial SKB III to each university and what is the Rector's policy in mentoring Menwa at State University of Surabaya from the formulation of this problem we can find out more about the organization of Menwa 804 State University of Surabaya. This type of research is qualitative research with the object of research is the organization of Menwa 804 State University of Surabaya. This study uses historical research methods, namely, Heuristics, Criticism, Interpretation, and Historiography. Data collection techniques are carried out by searching sources of historical facts in written form (archives, journals, books, etc.) and oral sources (interviews). Based on the results of the research conducted, it can be seen that the pattern of Menwa formation from 1994-2000 experienced a fairly rapid change. Based on the results of the understanding, the authors conclude that the facts and evidence in the history of Menwa's development and empowerment have been changed and adjusted to the government's needs for Ratih's use as a component of the state's defense reserves. The formation of Menwa in 2000 focused more on fostering Menwa as a special UKM engaged in the defense and security sector.*

**Keywords:** Student Regiment, Nationalisme, And Defense

## PENDAHULUAN

Pertahanan, keamanan, stabilitas, dan dinamisasi merupakan salah satu elemen yang sangat erat dalam pelaksanaan pembangunan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap segala bentuk pertahanan dan keamanan bangsa menjadi salah satu kewajiban bagi seluruh warga negara. Untuk menciptakan suatu kondisi pertahanan dan keamanan negara yang stabil, diperlukan peran serta warga negara dalam menciptakan suasana aman, tertib, dan selalu mendukung proses pembangunan bangsa dan negaranya. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (1) tentang pertahanan dan keamanan negara, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut sertadalam usaha pertahanan dan keamanan negara<sup>1</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terlepas dengan penanaman konsep terhadap nilai-nilai nasionalisme dan pancasilaisme, warga negara diharapkan dapat mewujudkan secara nyata konsep nasionalisme pada kegiatan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan konsep pertahanan dan keamanan negara juga dikaitkan dengan doktrin “Bela Negara” dalam implementasi Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta). 2.

Seiring dengan perkembangan jaman, peran aktif Menwa terus berganti disetiap masa dan mengalami peningkatan atas keberadaannya. Kemudian pada masa pemerintahan orde baru, peran serta tugas pokok dan fungsi Menwa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintahan pada masa tersebut. Menwa merupakan suatu wadah bagi mahasiswa yang ingin ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dimana anggota menwa yang berstatus mahasiswa aktif mereka juga dibekali dengan ilmu olah keprajuritan. Pada masa pemerintahan orde baru, mahasiswa disini memiliki peran penting dalam upaya keamanan dan pertahanan negara. Para mahasiswa pada masa tersebut, diwajibkan mengikuti wajib latih yang diberi nama “WALAWA” atau wajib latih mahasiswa dengan pertama kali diadakan di Bandung pada tanggal 13 Juni 1959<sup>2</sup>.

Diantaranya adalah beberapa penugasan dan operasi militer yang melibatkan Menwa. Pada tahun 1946 tepatnya tanggal 1 Juni 1964 Menwa “Mahasurya” Jawa Timur dibentuk dengan dikomandani oleh Ketua Presdisium Dewan Mahasiswa Universitas Airlangga yang bernama sdr. Ben. L. Tikoalu. Beliau adalah seorang anggota sipil dan masih berstatus mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga<sup>3</sup>.

Skripsi yang membahas tentang Menwa telah banyak ditulis oleh beberapa penulis sebelumnya, namun yang membedakan penulisan skripsi ini dengan yang lain adalah objek penelitian. Objek penelitian dikhususkan

pada organisasi Menwa yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Objek ini menarik untuk dibahas karena keberadaannya yang masih eksis pada masa sekarang. Selain hal diatas, penulis juga akan mengangkat permasalahan tentang kebijakan perubahan pembinaan Menwa yang dulunya dibawah pembinaan dari SKB. 3 Menteri (Menhan, Mendibud, dan Mendagri) yang sekarang dikembalikan kembali kepada perguruan tinggi masing-masing yang mempunyai organisasi Menwa dikampusnya.

Salah satu hal yang hendak diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah beberapa pola kebijakan yang mengatur tentang pembinaan Menwa skala besar ataupun kecil. Batasan penelitian ini dikhususkan pada lingkup Menwa tingkat Perguruan tinggi (Batalyon) yaitu Menwa Universitas Negeri Surabaya, dengan nomer urut pendirian organisasi 804. Maka dari itu, penulis mengkat pokok pembahasan dengan judul “Resimen Mahasiswa (Menwa) 804 Universitas Negeri Surabaya tahun 1994-2000”.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai bahan kajian sebagai berikut:

Mengapa terjadi pengalihan pembinaan Menwa dari SKB III Menteri ke masing-masing perguruan tinggi?  
Bagaimana kebijakan Rektor dalam pembinaan Menwa di Universitas Negeri Surabaya?

## METODE PENELITIAN

Proses penelitian sejarah yang sempurna diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan sebagai instrumen dan seperangkat prosedur kerja yang mengantarkan penulis dalam rangka penulisan. Penelitian merupakan tindakan untuk melakukan suatu prosedur dalam memperoleh data. Dalam penulisannya digunakan metode sejarah sebagai seperangkat prinsip dan proses penelitian yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi<sup>4</sup>. tahap awal yang digunakan dalam penulisan sejarah dengan cara mengumpulkan sumber terkait dengan tema yang skripsi yang berjudul Resimen Mahasiswa (Menwa) 804 Universitas Negeri Surabaya tahun 1994-2000 ditulis dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Kedua Studi dokumen adalah proses mencari informasi, menalaah, dan menghimpun data sejarah yang berupa dokumen-dokumen untuk menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen yang diperoleh berupa arsip sejaman dan beberapa buku-buku sejarah terkait penelitian. Ketiga dalam melakukan kritik sumber sejarah harus memperhatikan kritik intern. Kritik intern yaitu pengujian terhadap isi atau kandungan sumber sejarah. Kritik intern dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah, BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat (1)”, Hal. 163

<sup>2</sup> Staf Komando Resimen Mahasiswa “Mahasurya” Jawa Timur, 2000, “Sebuah Acuan Menyikapi S.K.B 3 Menteri Tentang

Pembinaan Resimen Mahasiswa”, Hal.1

<sup>3</sup> Staf Komando Resimen Mahasiswa “Mahasurya” Jawa Timur, 2000, *Sebuah Acuan Menyikapi S.K.B 3 Menteri tentang Pembinaan Resimen Mahasiswa*, Hal.2

<sup>4</sup> Aminusin Kasdi, 2015, *Memahami Sejarah*, Surabaya: UNESA Press, Hal.10

data sejarah yang kredibel, sehingga tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pada kritik intern peneliti melakukan verifikasi untuk menguji validitas sumber-sumber yang diperoleh dalam upaya penulisan penelitian. Keempat Interpretasi merupakan kegiatan menganalisis sumber sejarah. Peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah untuk menetapkan saling berhubungan antar fakta sejarah. Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan sejarah (historiografi). Pada tahap ini serangkaian fakta yang telah ditafsirkan akan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau ceritera sejarah<sup>5</sup>.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dengan mengingat Undang-undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi beserta perubahannya, maka Menhan, Mendikbud, dan Mendagri mengeluarkan surat Edaran kepada Rektor/Ketua/Direktur Pendidikan Tinggi di seluruh Indonesia, Keputusan Bersama III Menteri (Menhan, Mendikbud, dan Mendagri) Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000, Nomor : 39 A tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa. Keputusan tersebut berisi bahwa kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan, dan wawasan bela negara perlu dilaksanakan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)<sup>6</sup>.

Terjadi perubahan pembinaan Menwa bukan berarti pembubaran organisasi Menwa, hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan paradigma di segala bidang masyarakat, bangsa, dan bernegara termasuk pembinaan Menwa. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Menwa sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dan memberikan wewenang penuh kepada pimpinan perguruan tinggi untuk membina, mengatur, dan mengawasi mahasiswanya dalam UKM supaya lebih terarah. Pembinaan Menwa di perguruan tinggi juga diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Didalamnya berisi tentang pokok-pokok pedoman organisasi kemahasiswaan bab pengawasan, pembiayaan, struktur organisasi dll sudah tertulis secara jelas dan teratur. Dalam SKB III Menteri tahun 2000 tertulis bahwa kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan, dan wawasan bela negara dilaksanakan melalui UKM dan menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Pembinaan dan pemberdayaan Menwa sebagai komponen pertahanan menjadi tanggung

jawab Menteri Pertahanan. Dan pembinaan dan pemberdayaan Menwa dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah<sup>7</sup>.

### B. Pembahasan

Fungsi perguruan tinggi telah dirumuskan dalam Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut KB III Menteri tentang pembinaan dan pemberdayaan Menwa di lingkungan perguruan tinggi sebagai UKM, maka di keluarkan Surat Edaran Nomor : 2081/D/T/2000<sup>8</sup>.

Surat Edaran Nomor: 2081/D/T/2000 oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi di keluarkan untuk menanggapi pernyataan para Staf Menwa dan mempertimbangkan kondisi perguruan tinggi yang mengharapkan kejelasan status dan keberadaan Menwa di perguruan tinggi sebagai UKM. Serta memperkuat keberadaan dan status Menwa yang sebelumnya di keluarkan KB III Menteri tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa di perguruan tinggi.

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:

Mengingat kewenangan yang mengatur pelaksanaan kegiatan Menwa di luar kampus perguruan tinggi berada sepenuhnya pada Ditjen Sumdaman, Dephan, dan Ditjen Kesbang dan Linmas, Depdagri, maka Ditjen Dikti hanya sebatas koordinasi

Terbitnya SE Ditjen Sumdaman, Dephan, dan SE Dirjen Kesbang dan Linmas, Depdagri dan untuk memberikan kejelasan keberadaan dan status Menwa, agar kegiatannya berjalan sebagaimana mestinya dan untuk terus diberdayakan program dan kegiatannya.

Untuk selanjutnya perlu diterbitkan SE Dirjen Dikti sebagai aturan pendukungnya, dan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan

Tanpa mengurangi kekuatan hukum KB III Menteri yang masih berlaku, SE Dirjen Dikti tersebut, memuat tentang: Keberadaan organisasi Menwa didalam kampus perguruan tinggi tetap sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi

Kegiatan Menwa sebagai UKM yang selama ini dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan statuta perguruan tinggi, hendaknya terus di kembangkan oleh kampus-kampus perguruan tinggi.

- c. Atribut dan seragam disesuaikan berdasarkan kekhasan UKM di masing-masing perguruan tinggi
- d. Pembinaan dan penggunaan Menwa sebagai UKM oleh instansi terkait atau organisasi lain harus seijin pimpinan perguruan tinggi<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 11

<sup>6</sup> Keputusan Bersama III Menteri (Menhan, Mendikbud, dan Mendagri) Nomor: KB/14/M/X/2000, Nomor: 6/U/KB/2000, Nomor: 38 A tahun 2000 tentang "Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa", Hal. 1

<sup>7</sup> Keputusan Bersama III Menteri (Menhan, Mendikbud, dan Mendagri) Nomor: KB/14/M/X/2000, Nomor: 6/U/KB/2000, Nomor:

38 A tahun 2000 tentang "Pembinaan dan Peberdayaan Menwa", Hal. 4

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 2081/D/T/2000, tentang "Pemberdayaan Menwa di Perguruan Tinggi".

<sup>9</sup> Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 2081/D/T/2000, tentang "Pemberdayaan Menwa di Perguruan Tinggi", Hal. 2-3

Pembinaan dan pengembangan Menwa merupakan salah satu usaha sadar bangsa Indonesia terkhususnya mahasiswa untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Melalui usaha yang tidak kenal menyerah, Menwa terus dibina dan dikembangkan sebagai Ratih. Ratih dilingkungan Menwa tidak hanya dibekali ilmu olah keprajutitan tetapi juga memiliki ilmu pengetahuan sebagai identitasnya sebagai mahasiswa. Pembinaan Menwa pada tahap sekarang, difokuskan pada kegiatan pertahanan sipil, sishankamrata, dan penunjuang pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Untuk melaksanakan tugas dan pengabdian, Menwa harus mendapatkan ijin dari pimpinan perguruan tinggi. Sebagai pimpinan tertinggi di perguruan tinggi, Rektor berhak memberikan wewenang kepada Menwa untuk melaksanakan tugas dan pengabdian baik di dalam dan diluar kampus, dengan catatan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada hakekatnya pembentukan Menwa adalah bersifat sukarela dan terbatas. Terbatas karena sistem perkuliahan dengan kesibukan sebagai mahasiswa, sehingga peluang untuk mengabdikan dirinya menjadi terbatas. Pesatnya kemajuan teknologi dan pembangunan nasional menjadikan Menwa sadar bahwa tantangan yang dihadapi sekarang menjadi semakin berat. Tantangan tersebut berupa isu-isu pembubaran Menwa sebagai organisasi khusus bentukan pemerintahan orde baru yang harus dihilangkan dilingkungan kampus. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya gesekan atau bentrokan fisik mahasiswa menuntut pembubaran Menwa. Tetapi hal tersebut tidak merubah tekad perjuangan Menwa, Menwa terus berupaya dan berkembang demi kelangsungannya. Ide dan gagasan pembaharuan terus di upayakan untuk menunjang program pemerintah dibidang Hankam dan Ratih.

Pola pembinaan Menwa tahun 2000 difokuskan pada peran anggota Menwa yang merupakan mahasiswa aktif disuatu perguruan tinggi. Maka pembinaan dititik beratkan pada potensi pengembangan mahasiswa dalam upaya pembelaan negara. Mahasiswa yang merupakan salah satu komponen Ratih dilibatkan dalam pengoptimalan tenaga Ratih dilingkungan perguruan tinggi.

## PENUTUP

### A. Simpulan

Tanggal 11 Oktober 2000 dikeluarkan SKB III Menteri Nomor KB/14/M/X/2000, 6/U/KB/2000, dan 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dilingkungan perguruan tinggi. Hal ini tidak semata-mata menjadi alasan pembubaran Menwa, akan tetapi keberadaan Menwa yang semula di bawah naungan SKB III Menteri di kembalikan fungsinya kepada perguruan tinggi masing-masing. Mekanisme pengalihan pembinaan ini diarahkan sesuai dengan kedudukan anggota Menwa

yang merupakan seorang mahasiswa disuatu perguruan tinggi melalui kegiatan kemahasiswaan yang bergerak dibidang Ratih.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dengan mengingat Undang-undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi beserta perubahannya, maka Menhan, Mendikbud, dan Mendagri mengeluarkan surat Edaran kepada Rektor/Ketua/Direktur Pendidikan Tinggi di seluruh Indonesia, Keputusan Bersama III Menteri (Menhan, Mendikbud, dan Mendagri) Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000, Nomor : 39 A tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa. Keputusan tersebut berisi bahwa kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan, dan wawasan bela negara perlu dilaksanakan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

### B. Saran

Pembinaan dan pemberdayaan Menwa di perguruan tinggi membutuhkan dukungan dari pimpinan perguruan tinggi, baik secara moril dan meteril. Pembinaan Menwa dimasa sekarang merupakan aset dan potensi Ratih di lingkungan perguruan tinggi, sehingga organisasi Menwa bisa terus bertahan demi keberlangsungannya. Pimpinan perguruan tinggi harus dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pembinaan Menwa kearah perwujudan sesuai Tridharma Perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Dokumen.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2012. *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah. BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat (1).*
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. 2012. *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen kedua BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat (2).*
- Peraturan Pemerintah. 1962. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1962.* tentang pemanggilan dan pengerahan warga negara dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara.
- Staf Komando Resimen Mahasiswa "Mahasurya" Jawa Timur. 2000, Sebuah Acuan Umum Menyikapi S.K.B. 3 Menteri. Tentang Pembinaan Resimen Mahasiswa. Staf Komando Resimen Mahasiswa "Mahasurya" Jawa Timur. 1994. Sejarah Resimen Mahasiswa Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999. Tentang Rakyat Terlatih

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012. Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 tahun 2014. Tentang *Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi*.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 2081/D/T/2000. Tentang Pemberdayaan Menwa di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990. Tentang Pendidikan Tinggi. Keputusan Bersama III
- Menteri (Menhan, Mendibud, dan Mendagri) Nomor: KB/14/M/X/2000, Nomor: 6/U/KB/2000, Nomor: 38 A tahun 2000. Tentang *Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa*.
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 522/DIKTI/Kep/1996, tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Satuan Menwa (SATMENWA) di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1996. tentang, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Menwa di Perguruan Tinggi*.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998. Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
- B. Jurnal.**
- Widodo, Suwarno. *Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme* dalam Jurnal Ilmiah *Civis*, Vol. 1, No. 1, Januari 2011.
- Budiwibowo, Satrijo. *Revitalisasi Pancasila Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural* dalam Jurnal *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, No.2, April 2016.
- Ahandi, Muhammad. *Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara*, dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017, Vol. 1, No.1. 2017.
- Mohd Faiz Mohd Zain, Jamaie Hj. Hamil Dkk, *Pengaruh Nasionalisme Melayu Mewarnai Budaya Politik Melayu Dalam Umno (Influences Of Malay Nationalism In Culturalpolitics Of Umno)*, dalam Jurnal *Melayu*, Vol. 7, 2011.
- Une, Darwin. *Perkembangan Nasionalisme Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, dalam Jurnal *Inovasi*, Vol.7, No. 1, Maret 2010, Isbn 1693- 9034.
- Dewi, Ita Mutiara. *Nasionalisme Dan Kebangkitan Dalam Teropong*, dalam Jurnal *Mozaik*, Vol. 3, No. 3, Juli 2008, issn 1907-6126.
- C. Buku.**
- Waluyo, M. N. Budi. (Pokja Pengembangan Menwa). 2000. *Pembinaan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara*.
- Staf Komando Resimen Mahasiswa “Mahasurya” Jawa Timur. 2000. *Sebuah Acuan Menyikapi S.K.B 3 Menteri Tentang Pembinaan Resimen Mahasiswa*.
- Staf Komando Resimen Mahasiswa “Mahasurya”. 1998. *Tinjauan Umum tentang Upaya Pemantapan Pembinaan Resimen Mahasiswa Beserta SegalaAspeknya Guna Mencapai Penyempurnaan Kewajiban dengan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Olah Keprajuritan*.
- Tim penyusun Buku pedoman Skripsi UNESA. 2014. *Pedoman Penelitian Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S1) Universitas Negeri Surabaya*, Surabaya: Unesa Press.
- Kasdi, Aminusin. 2015. *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA Press
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah Terjemahan Nugroho Notosusanto*. Jakarta: UI Press.
- Rakornas II Pembebasan Tata Kerja dan Struktur Organisasi Menwa Indonesia Tahun 2010
- Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jendral Personil, Tenaga Manusia, dan Veteran. 1996, *Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Resimen Mahasiswa*. Jakarta.
- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. 1987. Bandung: Remada Karya
- Ajidarma, Seno Gumira. *Penembak Misterius*. 1999. Yogyakarta: Yayasan Galang
- Eriyanto. *Analisis isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya*. 2015. Denpasar: Kencana Prenada Grup
- Husken, Frans dkk. *Orde Zonder Order*. 2003. Yogyakarta: LKIS
- Kasdi, Aminudin. *Memahami Sejarah*. 2005. Surabaya: Unipres Unesa
- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soeharto. *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Otobiografi yang dipaparkan kepada G. Dwipayana dan ramadhan K.H. 1989. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada
- Ranjabar Jacobus, 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sukandi, A.K. *Politik kekerasan orde baru*. 2005. Bandung: Mizan.
- Nordholt, Henk Schulte. *Kriminalitas, modernitas, dan identitas dalam sejarah Indonesia*. 2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qadiri Abdullah Ahmad. 2000. *Manusia dan Kriminalitas*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- D. Website.**
- <https://ruangkumemajangkarya.wordpress.com/2011/12/17/seputar-mengenai-sengkolo-sengkala-sengkalan/>
- <https://spn.or.id/eka-prasetya-pancakarsa/>
- <http://ayouk91.blogspot.com/2011/05/kriminalitas.html>
- Pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 14.14



**UNESA**  
Universitas Negeri Surabaya